

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan tanggung jawab semua pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan memiliki peranan yang cukup besar, karena kualitas sumber daya manusia dapat dikembangkan melalui pendidikan. Menurut Sofyan Aman (1992 : 304), pendidikan di Indonesia berada dalam dua aspek kegiatan, yakni kegiatan pembudayaan dan kegiatan pengajaran. Kegiatan pembudayaan adalah upaya mentransformasi nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian dengan berbagai aspek mental, spiritual dan psikologis. Kegiatan pengajaran bertalian dengan upaya mentransformasi dan/atau penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan serta penerapannya.

Pendidikan merupakan salah satu faktor pembangunan bagi peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan bidang pendidikan sebagai suatu realisasi Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merupakan suatu keharusan dan mutlak dilakukan. Untuk kepentingan itu Surakhmad (1986 :7) mengungkapkan bahwa mewujudkan cita-cita bangsa yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan pendidikan yang manusiawi dalam arti pendidikan yang dapat menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan dan berjiwa Pancasila“. Uraian tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pasal 3, yaitu :

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan tujuan pendidikan di atas, maka manusia Indonesia seutuhnya yang diharapkan adalah manusia yang “bermoral” dan memiliki “kecerdasan”. Kedua aspek tersebut dibina dan dibentuk melalui kegiatan pendidikan secara seimbang dan dalam kenyataannya tidak dapat dipisahkan.

Persekolahan merupakan wahana yang strategis untuk mengoperasionalkan tujuan pendidikan nasional tersebut dalam artian untuk membentuk kepribadian, ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap pada peserta didik.

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan menengah kejuruan (SMK) merupakan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja, dan mengembangkan diri di kemudian hari. Oleh karena itu, sekolah kejuruan (SMK) mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mempersiapkan peserta didik sebagai tenaga muda terampil yang siap memasuki dunia kerja, sehingga peserta didik harus dipersiapkan sedini mungkin untuk lebih memahami tentang pentingnya arti demokrasi dan hukum, sehingga mampu menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum guna menghindari hal-hal yang tidak diharapkan yang menyangkut tentang kesempatan dan peluang kerja serta kesempatan untuk berkarir dan berprestasi dalam lingkungan pekerjaannya. Karena itu, Kurikulum SMK harus memperhatikan beberapa hal mendasar sebagai berikut : (1) pendidikan harus menanamkan tata nilai yang kuat dan jelas sebagai landasan pembentukan watak dan perkembangan kehidupan manusia (2) pendidikan harus memberikan sesuatu yang bermakna, baik yang ideal maupun yang pragmatis, sesuai dengan kebutuhan peserta didik, (3) pendidikan harus memberikan arah yang terencana bagi kepentingan bersama peserta

didik, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. (Kurikulum SMK 2004). Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan menengah kejuruan harus dijalankan atas dasar prinsip investasi SDM (*Human Capital Investment*). Semakin tinggi kualitas pendidikan dan pelatihan yang diperoleh seseorang, akan semakin produktif orang tersebut. Kualitas dari lulusan SMK tidak hanya ditentukan oleh keahlian yang dimiliki oleh setiap siswa berdasarkan program keahliannya masing-masing, tetapi juga harus didukung oleh keterampilan sosial yang dimiliki oleh setiap lulusan, seperti sikap demokratis dan kesadaran hukum. Akibatnya selain meningkatkan produktivitas nasional, meningkatkan pula daya saing tenaga kerja di pasar kerja global. Untuk mampu bersaing di pasar global, SMK harus mengadopsi nilai-nilai yang diterapkan dalam melaksanakan pekerjaan, seperti disiplin, taat asas, sadar hukum, demokratis, efektif, dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Soedijarto (1997 : 31) mengemukakan bahwa dalam menerjemahkan tujuan pendidikan nasional tidak hanya mengoperasikannya untuk tiap jenjang dan jalur pendidikan, melainkan juga lebih lanjut perlu menerjemahkannya ke dalam model-model mengajar yang mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Model-model mengajar yang dimaksud tersebut dapat ditunjang dengan menggunakan model pembelajaran yang dianggap dapat merespon dan memotivasi pola pikir kritis, reflektif, dan kreatif.

Oleh karena itu, sekolah dapat menjadi sarana untuk mensosialisasikan nilai-nilai kemampuan, sikap dan keterampilan yang diperlukan oleh siswa untuk hidup dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar agar peserta didik dapat mentransformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi serta nilai-nilai dan

keterampilan melalui kegiatan pembelajaran dan mata pelajaran yang telah ditentukan dalam kurikulum setiap bidang studi.

Bidang studi yang mengarahkan siswa untuk melatih keterampilan sosial pada siswa di tingkat SMK adalah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), khususnya dalam kompetensi **Mengembangkan Sikap Demokratis dan Berperilaku Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku.**

Pelajaran PKn di SMK merupakan salah satu dari program mata diklat normatif, disamping pelajaran Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra Indonesia, Sejarah, Pendidikan Kesehatan dan Jasmani. Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota masyarakat) baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Program normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup dan berkembang selaras dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Program ini berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada norma, sikap, dan perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta didik, disamping kandungan pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mata diklat pada kelompok normatif berlaku sama untuk semua program keahlian (Kurikulum SMK 2004).

Sejalan dengan maksud dari pembelajaran PKn dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Penjelasan Pasal 37 (1), PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, maka PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai tugas membentuk perilaku dan kepribadian serta membina sikap dan moral peserta didik yang sudah menjadi bagian integral dalam menunaikan tugasnya sehari-hari untuk mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Upaya untuk

mengembangkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air diantaranya dapat dengan mengembangkan sikap demokratis dan kesadaran hukum dalam diri siswa. Oleh karena itu dalam pembahasan kompetensi Mengembangkan Sikap Demokratis dan Berperilaku Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku, dianggap efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa.

Dengan adanya mata pelajaran PKn di sekolah diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan melibatkan seluruh komponen pendidikan. Kurikulum dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, mengacu kepada tujuan instruksional, yang menyeimbangkan antara materi pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan. Peranan guru tidak kalah penting, dituntut untuk membantu tercapainya tujuan pembelajaran, serta tersedianya media, sarana, dan prasarana pembelajaran. Pembelajaran harus mampu merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran yang tepat, yang mencakup aspek tujuan, proses pembelajaran, materi, metoda, dan alat evaluasi atau penilaian.

Sebagai mata pelajaran normatif, bidang studi PKn mengkaji tentang aspek etika, moral, norma dan budi pekerti berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai luhur budaya bangsa Indonesia dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang pada akhirnya menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap siswa akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan sikap peserta didik terhadap hukum dan nilai-nilai demokrasi Indonesia yang pada akhirnya dapat menumbuhkan bahkan meningkatkan kesadaran hukum siswa dan memiliki sikap demokratis yang dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, maupun lingkungan pekerjaannya kelak di kemudian hari.

Namun sejak diimplentasikan pada jenis dan jenjang pendidikan, PKn menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan. Kendala dan keterbatasan tersebut adalah : (1) masukan instrumental (*instrumental input*) terutama yang berkaitan dengan kualitas guru serta keterbatasan fasilitas dan sumber belajar, dan (2) masukan lingkungan (*environmental input*) terutama yang berkaitan dengan kondisi dan situasi kehidupan politik negara yang kurang demokratis. Dengan demikian, pelaksanaan PKn tidak mengarah pada misi sebagaimana seharusnya. Beberapa indikasi empirik yang menunjukkan salah arah tersebut antara lain adalah sebagai berikut : **Pertama**, proses pembelajaran dan penilaian dalam PKn lebih menekankan pada dampak instruksional (*instructional effect*) yang terbatas pada penguasaan materi (*content mastery*) atau dengan kata lain hanya menekankan pada dimensi kognitifnya saja. Sedangkan pengembangan dimensi-dimensi lainnya (afektif dan psikomotor) serta pemerolehan dampak pengiring (*nurturant effect*) sebagai “*hidden curriculum*” belum mendapat perhatian sebagaimana semestinya. **Kedua**, pengelolaan kelas belum mampu menciptakan suasana kondusif dan produktif untuk memberikan pengalaman belajar kepada siswa melalui perlibatannya secara proaktif dan interaktif baik dalam proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas, sehingga berakibat pada miskinnya pengalaman belajar yang bermakna (*meaningful learning*) untuk mengembangkan kehidupan dan perilaku siswa. **Ketiga**, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sebagai wahana sosio-pedagogis untuk mendapatkan “*hand-on experience*” juga belum memberikan kontribusi yang signifikan untuk menyeimbangkan antara penguasaan teori dan praktek pembiasaan perilaku dan keterampilan dalam berkehidupan yang demokratis dan sadar hukum. (Budimansyah, 2006)

Masalah tersebut tentunya harus mendapat perhatian dari semua pihak, terutama kalangan pendidikan, bagaimana mendidik siswa agar menjadi warga negara

yang baik, memiliki pengetahuan, pemahaman, dan sikap serta perilaku yang tertib hukum. Wahab (1999 : 2) menunjukkan kurang efektifnya pembinaan nilai-nilai moral di sekolah. Bahkan dalam kasus yang lebih besar, yakni berbagai krisis yang dialami Indonesia dewasa ini disebabkan adanya degradasi moral boleh jadi bersumber pada kesalahan pendidikan di masa lalu.

Prinsip pembinaan moral dan norma yang perlu diperhatikan menurut ketentuan Dirjen Dikti, yaitu melalui keterpanggilan-keterlibatan-keterundangan dan keterkaitan siswa sendiri terhadap konsep moral yang ditampilkan (Depdikbud, 1982-1983 : 14-15). Melalui cara ini tidak secara langsung kita diajarkan, melainkan siswa diundang untuk menangkap sendiri misi moral yang ingin ditanamkan oleh guru melalui model pembelajaran yang dipakai.

Oleh karena itu, salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh guru PKn agar membelajarkan tidak hanya menekankan pada aspek kognitif saja, tentunya harus mampu memilih metoda belajar yang tepat dan model pembelajaran yang dianggap mendukung dalam pembelajaran PKn, khususnya dalam upaya menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa di SMK Negeri 13 Bandung melalui model pembelajaran portofolio, karena dalam model pembelajaran portofolio ini siswa dilatih untuk menghargai dan menerima pendapat orang lain dalam diskusi, serta didalam pengerjaan tugas kelompok sehingga terciptalah suasana belajar yang demokratis.

Alasan memilih lokasi penelitian di SMK karena siswa di SMK pada dasarnya sangat berpotensi untuk bisa mengembangkan model pembelajaran portofolio, karena dalam mata diklat produktif setiap peserta didik dituntut untuk memiliki kemampuan menghasilkan suatu 'karya' atau 'keahlian' sesuai dengan program keahliannya masing-masing, proses yang dipakai pada mata diklat produktif

ini pada prinsipnya memiliki kesamaan dengan model pembelajaran portofolio yang menghasilkan ‘karya terpilih’ dari proses belajar siswa dalam mata diklat normatif, khususnya PKn. SMK Negeri 13 Bandung dipilih sebagai lokasi penelitian karena di SMK Negeri 13 Bandung telah dipraktekkan model pembelajaran portofolio dalam pelajaran PKn. Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran tentang model pembelajaran portofolio dalam pelajaran normatif, khususnya PKn yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 13 Bandung. SMK Negeri 13 Bandung dengan program keahlian Analisis Kimia merupakan SMK pertama di Jawa Barat yang berhasil meraih sertifikat ISO 9001 : 2000 untuk Sistem Manajemen Mutu pada tanggal 25 Juni 2005 dari PT TUV Internasional Indonesia (Jerman). Tamatan dari SMK Negeri 13 Bandung banyak terserap di Dunia Usaha / Dunia Industri dan instansi pemerintah, keberhasilan dan prestasi yang telah diraih oleh SMK Negeri 13 Bandung tentunya menjadi salah satu alasan untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian. Melalui model pembelajaran PKn berbasis portofolio, diupayakan dapat membangkitkan minat belajar peserta didik secara aktif, kreatif, juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai dan kemampuan berpartisipasi secara efektif, serta diiringi suatu sikap tatanggung jawab, sebagaimana yang kemukakan oleh Djahiri (2001 : 1) bahwa :

Model pembelajaran portofolio merupakan pembelajaran sebagai proses KBM yang bersoko guru pada aktivitas belajar siswa kadar tinggi dan *multi domain* serta *multi dimensional*, proses ajar *utuh-terpadu*, *interdisipliner*, akan *memberdayakan* program baru PKn disamping menjadi wacana kesempatan pelatihan pelakonan berbagai kegiatan dan kemahiran siswa menjadi warga masyarakat serta anak bangsa yang baik, demokratis, cerdas dan berbudaya Indonesia

Oleh karena itu dalam mengefisienkan pembelajaran PKn melalui model pembelajaran berbasis portofolio sebagai salah satu alternatif dalam upaya pelatihan pelakonan berbagai kegiatan dan kemahiran siswa menjadi warga negara atau warga

masyarakat yang baik, demokratis dan berbudaya Indonesia yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, *Character and National Building* atau *A Good Young Citizenship*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat diidentifikasi, apakah model pembelajaran PKn berbasis portofolio benar-benar efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa khususnya siswa di SMK Negeri 13 Bandung, hal inilah yang mendasari penelitian ini dilakukan.

B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Inti dari penelitian ini adalah pendekatan proses pembelajaran. Pendekatan proses pembelajaran ini dianggap memiliki peranan penting dalam keberhasilan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun, pendekatan proses pembelajaran sangat beragam, tetapi untuk saat ini pembelajaran model PKn berbasis portofolio memiliki peranan yang dianggap efektif dalam proses pembelajaran. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini akan mengkaji tentang efektivitas model pembelajaran PKn berbasis portofolio dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa.

Pembelajaran PKn harus mencakup proses dan hasil belajar siswa di sekolah yang berkaitan dengan aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan yang telah direncanakan dalam kurikulum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan kenyataan menunjukkan bahwa cakupan hasil belajar yang berkenaan dengan aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta keterampilan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka salah satu alternatif model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran PKn berbasis portofolio, dimana model ini menggambarkan seluruh kegiatan atau aktivitas siswa sesuai dengan

kemampuannya baik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan siswa, sehingga memiliki kepribadian yang utuh dan bertanggung jawab terhadap diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh karena itu, maka penelitian ini akan difokuskan terhadap masalah **“Apakah model pembelajaran PKn berbasis portofolio efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa?”**

Fokus masalah dalam penelitian ini lebih lanjut diarahkan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Perencanaan apa yang dilakukan guru PKn untuk mempersiapkan model pembelajaran PKn berbasis portofolio?
2. Pelaksanaan dan pemantapan apa yang dilakukan guru PKn pada proses pembelajaran PKn berbasis portofolio di SMK Negeri 13 Bandung?
3. Apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan model pembelajaran PKn berbasis portofolio?
4. Apakah model pembelajaran PKn berbasis portofolio dianggap sudah efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa?
5. Apakah sikap demokratis dan kesadaran hukum yang dimiliki oleh siswa dapat memberikan manfaat bagi siswa dalam mempersiapkan dirinya memasuki dunia usaha/dunia industri?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran PKn berbasis portofolio dalam kompetensi **Mengembangkan Sikap Demokratis dan Berperilaku Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku**

efektif dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa di SMK Negeri 13 Bandung

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperoleh gambaran, bagaimana persiapan dalam melaksanakan model pembelajaran PKn di SMK Negeri 13 Bandung.
- b. Untuk memperoleh gambaran, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran PKn berbasis portofolio di SMK Negeri 13 Bandung.
- c. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan model pembelajaran PKn berbasis portofolio dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa di SMK Negeri 13 Bandung.
- d. Untuk mengetahui gambaran, keefektifan model pembelajaran PKn berbasis portofolio dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa di SMK Negeri 13 Bandung.
- e. Untuk mengetahui sampai sejauh mana manfaat pembelajaran PKn bagi siswa SMK Negeri 13 Bandung dalam mempersiapkan dirinya untuk memasuki dunia usaha/dunia industri.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara :

1. Manfaat Teoretis

- a. Mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalisme guru PKn dalam penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar, baik dikelas maupun di luar kelas.
- b. Melakukan inovasi pembelajaran PKn dengan menggunakan model pembelajaran alternatif yang inovatif.

- c. Mengembangkan kurikulum implementatif di tingkat sekolah sesuai dengan tuntutan Kurikulum SMK 2004.
- d. Memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi pendidikan dalam upaya menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa melalui model pembelajaran PKn berbasis portofolio.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Guru

- a. Dituntut untuk memiliki kreativitas dan daya nalar yang tinggi serta wawasan dan kemampuan tentang metoda, media, model, sumber dan evaluasi mengajar yang bervariasi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan menggunakan model pembelajaran PKn berbasis porofolio diharapkan proses KBM-KBS berkembang, terutama dalam menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa melalui pembelajaran PKn tersebut harus dikuasai sesuai dengan fungsi dan peran serta tanggung jawabnya secara profesional.
- b. Sesuai dengan Kurikulum SMK 2004 diharapkan guru mampu mengembangkan kurikulum implementatif yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan program keahliannya masing-masing, karena secara paedagogik-didaktik-metodik dari PKn yang merupakan program pendidikan dan pengajaran yang menggunakan pola pendidikan nilai-afektif tinggi, pengajaran dan pembelajaran yang terpadu, *multi domain, multi materi-metoda-media-sumber-evaluasi, siswa sentris* dengan *eco-systemnya*, maka guru dituntut untuk melakukan penyesuaian, penerapan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran

PKn, dan peneliti menganggap model pembelajaran berbasis portofolio dianggap sesuai.

- c. Sebagai informasi dan rujukan bagi guru PKn untuk meningkatkan kualifikasi hasil belajar siswa yang tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja, tetapi mampu melibatkan aspek afektif dan psikomotor siswa dalam proses belajarnya.
- d. Memberikan informasi dan rujukan bagi peneliti selanjutnya serta para pengambil kebijakan, baik dalam dunia persekolahan maupun praktisi lainnya yang berhubungan dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

2) Bagi Siswa

- a. Memotivasi potensi peserta didik yang telah memiliki nilai dasar moral untuk lebih dikembangkan agar memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk melaksanakan hukum dan demokrasi dalam kehidupannya.
- b. Menambah wawasan serta keterampilan sosial "*life skill*", "*civic skill*", "*civic life*" pada peserta didik untuk mempersiapkan dirinya dalam kehidupan di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
- c. Memberikan bekal bagi peserta didik dalam memasuki lingkungan kerja, sehingga diharapkan memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan prinsip-prinsip demokratis dan berusaha menumbuhkan kesadaran hukum yang tinggi.

E. Definisi Konseptual

Untuk menghindari kemungkinan salah konsep dan salah pengertian, dijelaskan beberapa istilah teknis dalam penelitian ini yang dipandang penting untuk diketahui maksudnya:

1. Efektivitas

Banyak pengertian tentang efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli dalam buku-bukunya. Efektivitas menurut Kamus Bahasa Indonesia (1995 : 250) diambil dari kata efektif yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang mampu membawakan hasil. Maksudnya bahwa pembelajaran dianggap efektif, jika siswa mengalami berbagai pengalaman baru dan perilakunya menjadi berubah menuju titik akumulasi kompetensi yang dikehendaki (Rosyada, 2004 : 120). Akan tetapi, idealitas tersebut tidak akan tercapai apabila tidak melibatkan siswa dalam perencanaan dan proses pembelajaran, artinya siswa dituntut untuk lebih berpikir kritis dan kreatif dalam memahami suatu kompetensi dengan cara pemecahan masalah.

Slavin (1994 : 310) berpendapat, bahwa keefektifan model pembelajaran terdiri dari empat indikator, yaitu (1) kualitas pembelajaran (*Quality of Instruction*), (2) kesesuaian tingkat pembelajaran (*Appropriate Level of Instruction*), (3) insentif (*Incentive*), dan (4) waktu (*Time*).

Kualitas pembelajaran, maksudnya adalah banyaknya informasi atau keterampilan yang disajikan siswa dapat mempelajari dengan mudah. Dengan kata lain, makin kecil tingkat kesalahan yang diperoleh makin efektif tingkat pembelajarannya. Penentuan tingkat efektivitas pembelajaran tergantung pada pencapaian tujuan pembelajaran, biasanya disebut dengan istilah ketuntasan belajar.

Kesesuaian tingkat belajar, yaitu sejauh mana guru mamastikan kesiapan siswa untuk mempelajari pengetahuan baru (siswa mempunyai pengetahuan dan

keterampilan yang berkaitan dengan pengetahuan baru tersebut). Dengan kata lain, materi pembelajaran yang diberikan tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah.

Insentif, yaitu seberapa besar seorang guru memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas-tugas belajarnya. Semakin besar motivasi yang diberikan guru kepada siswa maka keefektifan siswa menjadi semakin besar pula. Dengan demikian, pembelajaran akan lebih efektif.

Waktu, yaitu banyaknya waktu yang diberikan kepada siswa untuk mempelajari materi-materi yang disajikan. Pembelajaran akan efektif apabila siswa dapat menyelesaikan pembelajaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Menurut Egger dan Kauchak (1988 : 1), “pembelajaran akan efektif jika siswa secara aktif dilibatkan dalam pengorganisasian dan penemuan informasi atau pengetahuan. Siswa tidak hanya bersifat pasif menerima pengetahuan yang diberikan guru”. Hasil pembelajaran ini tidak hanya meningkatkan pemahaman saja, melainkan meningkatkan keterampilan berpikir siswa.

Konsekuensinya, bahwa dalam pembelajaran sangat perlu diperhatikan bagaimana keterlibatan siswa dalam pengorganisasian pelajaran dan pengetahuannya. Semakin aktif siswa maka ketercapaian ketuntasan pembelajaran pun semakin besar, sehingga semakin efektiflah pembelajaran.

Pembelajaran dianggap efektif dalam penelitian ini, apabila model pembelajaran PKn berbasis prtfolio dalam kompetensi **Mengembangkan Sikap Demokratis dan Berperilaku Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku** mampu menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi paling sedikit dua dari tiga persyaratan berikut, yaitu :

1. Belajar siswa secara klasikal sudah tuntas
2. Tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai
3. Respon siswa terhadap pembelajaran positif

Oleh karena untuk mencapai pembelajaran yang efektif diperlukan suatu solusi, maka salah satu solusi yang dapat ditawarkan adalah dengan menggunakan model pembelajaran berbasis portofolio, yang dianggap mampu memenuhi ketercapaian persyaratan tersebut diatas.

2. Model Pembelajaran Portofolio

Model adalah pola, baik berupa contoh, acuan atau ragam dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan, atau gaya suatu pola yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam rangka kegiatan belajar siswa untuk mencapai suatu tujuan. (Kamus Bahasa Indonesia)

Pembelajaran adalah suatu proses penyampaian pengetahuan yang bertujuan membentuk manusia berbudaya melalui proses pewarisan atau upaya mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang baik.

Portofolio sebenarnya dapat diartikan sebagai suatu wujud benda fisik, sebagai proses sosial padagogis, maupun sebagai *adjective*. Sebagai wujud benda fisik, portofolio itu adalah bundel, yakni kumpulan atau dokumentasi hasil pekerjaan peserta didik yang disimpan pada suatu bundel. Misalnya hasil tes awal (*pre-test*), tugas-tugas, catatan anekdot, piagam penghargaan, keterangan melaksanakan tugas terstruktur, hasil tes akhir (*post-test*), dan sebagainya. Sebagai suatu proses sosial padagogis, portofolio adalah *collection of learning experience* yang terdapat di dalam pikiran peserta didik, baik yang berujud pengetahuan (*kognitif*), keterampilan (*skill*), maupun nilai dan sikap (*afektif*). Adapun sebagai suatu *adjective*, portofolio sering

kali disandingkan dengan konsep lain, misalnya dengan konsep pembelajaran dan konsep penilaian. Jika disandingkan dengan konsep pembelajaran, maka dikenal dengan istilah pembelajaran berbasis portofolio (*portofolio based learning*), sedangkan jika disandingkan dengan konsep penilaian, maka dikenal istilah penilaian berbasis portofolio (*portofolio based assessment*). (Budimansyah, 2002 : 1-2)

Portofolio merupakan kumpulan informasi yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana kelas siswa berkenaan dengan suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio kelas berisi bahan-bahan seperti pernyataan-pernyataan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan karya seni asli. Bahan-bahan ini menggambarkan (1) hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan suatu masalah yang telah mereka pilih, (2) hal-hal yang telah dipelajari siswa berkenaan dengan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah tersebut, (3) kebijakan publik yang telah dipilih atau dibuat oleh siswa untuk mengatasi masalah tersebut, (4) rencana tindakan yang telah dibuat siswa untuk digunakan dalam mengusahakan agar pemerintah menerima kebijakan yang mereka usulkan (Somardi, 2001 ; 50)

Dengan demikian, portofolio merupakan karya terpilih kelas siswa secara keseluruhan yang bekerja secara kooperatif membuat kebijakan publik untuk membahas pemecahan terhadap suatu masalah kemasyarakatan.

Model pembelajaran berbasis portofolio merupakan satu bentuk dari praktek belajar kewarganegaraan, yaitu suatu inovasi pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami teori secara mendalam melalui pengalaman belajar praktek – empirik. Praktek belajar ini dapat menjadi program pendidikan yang mendorong kompetensi, tanggung jawab, dan partisipasi peserta didik, belajar menilai, dan mempengaruhi kebijakan umum (*public policy*), memberanikan diri

untuk berperan serta dalam kegiatan antarsiswa, antarsekolah, dan antaranggota masyarakat. (Boediono dalam Budimansyah, 2002 : 3)

Model pembelajaran berbasis portofolio memperkenalkan kepada siswa dan mendidik mereka dengan beberapa metoda dan langkah-langkah yang digunakan dalam proses politik. Pembelajaran ini bertujuan untuk membina komitmen aktif para siswa terhadap kewarganegaraannya dan pemerintahnya dengan cara :

- a. Membekali pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif.
- b. Membekali pengalaman praktis yang dirancang untuk mengembangkan kompetensi dan efektivitas partisipasi.
- c. Mengembangkan pemahaman akan pentingnya partisipasi warganegara.

Pembelajaran ini akan menambah pengetahuan, meningkatkan keterampilan, dan memperdalam pemahaman siswa tentang materi yang dibahas. Pembelajaran ini bertujuan untuk membantu siswa belajar bagaimana cara mengungkapkan pendapat, bagaimana cara menentukan tingkat pemerintahan dan lembaga pemerintahan manakah yang paling tepat dan layak untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi oleh mereka, dan bagaimana cara mempengaruhi penetapan-penetapan kebijakan pada tingkat pemerintahan tersebut. Pembelajaran ini mengajak para siswa untuk bekerjasama dengan teman-temannya di kelas dan dengan bantuan guru serta sumber lainnya, siswa dapat menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai berikut : (1) Mengeidentifikasi masalah yang akan dikaji, (2) Mengumpulkan dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji, (3) Mengkaji pemecahan masalah, (4) Membuat kebijakan publik, (5) Membuat rencana tindakan. (Somardi, 2001 ; 50)

Jadi, yang dimaksud dengan model pembelajaran portofolio dalam penelitian ini adalah model pembelajaran yang mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

Tahap I : Mengidentifikasi masalah kebijakan publik di masyarakat

Tahap II : Memilih satu masalah untuk kajian kelas

Tahap III : Mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji oleh kelas

Tahap IV : Membuat portofolio

Tahap V : Menyajikan portofolio

Tahap VI : Refleksi terhadap pengalaman belajar

3. Pembelajaran PKn

PKn di SMK termasuk pada program mata diklat normatif. Program normatif adalah kelompok mata diklat yang berfungsi membentuk peserta didik menjadi pribadi utuh, yang memiliki norma-norma kehidupan sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial (anggota masyarakat) baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga dunia. Program normatif diberikan agar peserta didik bisa hidup dan berkembang selaras dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Program ini berisi mata diklat yang lebih menitikberatkan pada norma, sikap, dan perilaku yang harus diajarkan, ditanamkan, dan dilatihkan pada peserta didik, disamping kandungan pengetahuan dan keterampilan yang ada di dalamnya. Mata diklat pada kelompok normatif berlaku sama untuk semua program keahlian (Kurikulum SMK 2004). Hal ini sejalan dengan pembelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, bahwa PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

PKn sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius serta memiliki karakteristik yang multidimensional, perlu dilihat dalam tiga kedudukan. **Pertama**, PKn sebagai suatu bidang kajian ilmiah mengenai “*civic virtue*” dan “*civic culture*” yang menjadi landasan PKn sebagai program kurikuler dan gerakan sosial-budaya kewarganegaraan. **Kedua**, PKn sebagai program kurikuler yang memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius baik dalam latar pendidikan di sekolah maupun di luar sekolah, yang berfungsi sebagai dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan masalah-masalah sosial secara interdisipliner, sehingga siswa dapat mengambil keputusan yang jernih dan bernalar serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. **Ketiga**, PKn sebagai gerakan sosial-budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun “*civic virtue*” dan “*civic culture*” melalui partisipasi aktif secara cerdas, demokratis, dan religius dalam lingkungannya. (Winataputra, 1999 :23)

Jadi, PKn merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai tugas membentuk perilaku dan kepribadian serta membina sikap dan moral peserta didik yang sudah menjadi bagian integral dalam menunaikan tugasnya sehari-hari. Oleh karena itu dalam pembahasan kompetensi **Mengembangkan Sikap Demokratis dan Berperilaku Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku**, diharapkan mampu menumbuhkan sikap demokratis dan kesadaran hukum siswa.

Menurut Rochman Natawidjaja dan H.A. Moein Moesa (1991 : 23), yang dimaksud dengan “Peranan pembelajaran adalah upaya pembimbingan terhadap siswa agar siswa itu secara sadar dan terarah berkeinginan untuk belajar dan memperoleh hasil belajar sebaik-baiknya sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa yang

bersangkutan”. Hal ini sejalan dengan pembelajaran PKn menurut UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, bahwa PKn dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

4. Sikap Demokratis

Sikap dalam pengertian umum dipandang sebagai seperangkat reaksi-reaksi afektif terhadap objek tertentu berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu (Mar’at, 1982 : 19). Sikap adalah kecenderungan perilaku atau reaksi seseorang terhadap suatu stimulus yang datang kepada dirinya (Nana S. dan Ibrahim, 1989 : 107).

Demokrasi berbeda dengan demokratis. Demokrasi secara harfiah dapat kita pahami dari asal usul katanya yaitu “*demos*” yang artinya rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan. Secara bebas, demokrasi dapat diterjemahkan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat (Friedrich – Ebert – Stiftung, 2003 : 1). Demokratis adalah proses demokrasi, artinya sesuatu proses yang melibatkan rakyat (Friedrich – Ebert – Stiftung, 2003 : 3).

Sikap demokratis adalah sikap siswa dalam proses pembelajaran yang dilandasi nilai-nilai demokrasi, yaitu (1) penghargaan terhadap kemampuan, (2) menjunjung tinggi keadilan, (3) menerapkan persamaan kesempatan, dan (4) memperhatikan keragaman peserta didik. Dalam prakteknya, para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran perlu adanya suasana yang terbuka, akrab, dan saling menghargai. (Budimansyah, 2002 : 7)

Menurut Thomas R. Dye dan Harmon Zeilgler (1996 : 7) ide dasar dari demokrasi merefleksikan empat hal, (1) partisipasi rakyat di dalam keputusan, (2) pengakuan hak-hak minoritas, (3) menghargai martabat individu, dan (4) kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan diri.

Jadi, yang dimaksud dengan sikap demokratis dalam penelitian ini adalah sikap hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sikap tersebut antara lain muncul dalam bentuk : (1) menerima perlakuan demokratis dari orang lain, dan (2) berperilaku demokratis kepada orang lain. (Malihah dan Resmini, 2004 : 7)

5. Kesadaran Hukum

Sutjipto Raharjo (2000 : 76) mendefinisikan kesadaran hukum sebagai “Kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pengembangannya”.

Jadi yang dimaksud dengan kesadaran hukum dalam penelitian ini adalah kesadaran siswa dalam menerima dan mentaati hukum atau peraturan yang berlaku yang diajarkan melalui pembelajaran PKn khususnya kompetensi yang relevan dengan mata pelajaran PKn di sekolah sebagai bekal untuk dirinya dikemudian hari yang bertujuan agar dapat menjadikan siswa sebagai warga negara yang baik, yang taat pada hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini terlihat dari indikator kesadaran hukum, yaitu (1) pengetahuan hukum artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, (2) pemahaman hukum artinya seorang warga negara mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, terutama dari segi isi hukum tersebut, (3) sikap hukum artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum, (4) perilaku

hukum artinya seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku (Soekanto, 2003 : 228)

F. Asumsi Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka tersebut diatas, maka penelitian ini berasumsi sebagai berikut :

1. Upaya untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dan membentuk kepribadian utuh yang bertanggung jawab aktif dan kreatif dapat terwujud bagi siswa SMK, salah satunya melalui pembelajaran PKn khususnya pada kompetensi **Mengembangkan Sikap Demokratis dan Berperilaku Sesuai Dengan Hukum Yang Berlaku** dengan menggunakan model pembelajaran berbasis poerofolio yang efektif dan efisien, “salah satu tujuan pembelajaran *civic* adalah untuk menumbuhkan berpikir yang reflektif, kritis dan kreatif, seyogyanya dikembangkan” (Somantri, 1975 : 41) sehingga mampu menciptakan suasana kelas menjadi lebih aktif.
2. Keberhasilan model pembelajaran berbasis portofolio sangat ditunjang oleh kemampuan dan kemahiran guru atau pendidik secara professional untuk diterapkan dalam kegiatan belajar.
3. Model pembelajaran PKn berbasis portofolio efektif untuk menumbuhkan sikap demokratis siswa, “demokratis adalah proses demokrasi, artinya sesuai proses yang melibatkan rakyat” (Fredrich – Ebert – Stiftung, 2003 : 3), dalam model pembelajaran tersebut proses belajar peserta didik dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu (1) penghargaan terhadap kemampuan, (2) menjunjung tinggi keadilan, (3) menerapkan persamaan kesempatan, (4) memperhatikan

keragaman peserta didik. Dalam prakteknya, para pendidik hendaknya memposisikan peserta didik sebagai insan yang harus dihargai kemampuannya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran perlu adanya suasana terbuka, akrab, dan saling menghargai (Budimansyah 2002: 7). Sikap demokratis dapat terlihat dalam bentuk (1) menerima perlakuan demokratis dari orang lain dan (2) berperilaku demokratis kepada orang lain (Malihah dan Resmini, 2004 : 7).

4. Model pembelajaran PKn berbasis portofolio efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa, karena siswa dituntut untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan hukum yang berlaku dalam kehidupannya. “Kesadaran masyarakat untuk menerima dan menjalankan hukum sesuai dengan rasio pengembangannya” (Rahardjo, 1975 ; 76) merupakan pengertian dari kesadaran hukum. Adapun indikator dari kesadaran hukum itu sendiri adalah ; (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukum; (3) sikap hukum; dan (4) perilaku hukum (Soekanto, 2003 : 228)
5. Proses untuk menumbuhkan sikap demokrasi dan kesadaran hukum siswa dapat terwujud dengan “*long life education*” dan “*life skill*” dengan mempelajari “Beri seseorang ikan, maka anda akan memberinya makan sehari, namun ajarkan dia mengail, agar anda menghidupinya sepanjang umur” (Covey, 1977) yang didasari pada empat pilar pendidikan yaitu “*learning to know*” (pembelajaran untuk tahu), “*learning to do*” (pembelajaran untuk berbuat), “*learning to be*” (pembelajaran untuk membangun jati diri yang kokoh), dan “*learning to love together*” (pembelajaran untuk hidup bersama secara harmonis) (UNESCO dalam Budimansyah, 2002 : i)